

REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT	13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	13
2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	27
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	44
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	50
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	60
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal R.I. dan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	63
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	70
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	73
BAB IV VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	73
4.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	73

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	75
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	81
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	83
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	88
BAB VII PENUTUP	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Periode Oktober 2016	36
Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah Pns Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode Oktober 2016	37
Tabel 2.3 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang Dan Eselon Periode Oktober 2016	38
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	40
Tabel 2.5 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	45
Tabel 3.1 Penduduk Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Agustus 2016	61
Tabel 3.2 Penduduk Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Agustus 2016	61
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi <i>Renstra Sebelumnya</i>	89
Tabel 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi <i>Review Renstra</i>	94
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat <i>Renstra Sebelumnya</i>	98
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat <i>Review Renstra</i>	103
Tabel 6.1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

35

KATA PENGANTAR

Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang menjadi pedoman seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berupaya menyusun dokumen Review Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018 dengan acuan kebijakan, strategi dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut.

Dokumen RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Gubernur terpilih periode 2013-2018 untuk urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian selama 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara langsung tergantung pada kecermatan dalam menentukan program strategis yang diuraikan secara detil dalam matriks Program dan Kegiatan tahunan.

Kepada seluruh pihak yang telah turut serta mencurahkan pikiran dan tenaga dalam penyusunan RENSTRA ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Bandung, 30 Desember 2016

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19621121 198909 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Selain mengakomodasi prioritas pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dimuat dalam RPJMD, dokumen Renstra juga memuat tentang kebijakan dinas serta target sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya, sebagai acuan untuk perencanaan penganggaran tahunan pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pada kurun waktu 2013-2016 telah terjadi berbagai perubahan strategis yaitu adanya penyelarasan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016. Terbitnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Selain itu pula terjadi perubahan nomenklatur di tingkat pusat menjadi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga diterbitkan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 2015-2019.

Kewenangan pemerintah daerah juga mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terjadi perubahan urusan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan tersebut maka perlu dilakukan *Review* terhadap Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 2013-2018, sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam kembali arah kebijakan, program, kegiatan dan sasaran Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.

Proses penyusunan *Review* Renstra ini melibatkan seluruh jajaran unit organisasi Disnakertrans Provinsi Jawa Barat sehingga penyempurnaannya merupakan representasi dari seluruh unit di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat sebab dokumen *Review* Renstra ini akan menjadi acuan semua unit jajaran Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dalam merencanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi dalam kurun waktu 2013-2018.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan *Review* Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013-2018 ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar hukum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat 2005 – 2025;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dengan Kebijakan Nasional;

34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud yang ingin dicapai dengan disusunnya Review Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa tahun 2013-2018 adalah :

1. Tersedianya arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi selama kurun waktu tahun 2013-2018.
2. Tersedianya pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2013-2018.
3. Terwujudnya gambaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2013-2018 sebagai perwujudan tugas pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Review Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
2. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program dalam kurun waktu Tahun 2013-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
- 2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal R.I. dan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meliputi sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sub urusan penempatan tenaga kerja, sub urusan hubungan industrial, sub urusan pengawasan ketenagakerjaan, sub urusan perencanaan penyiapan pemindahan transmigran yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- d. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mempunyai peran penting dalam pencapaian peningkatan daya beli masyarakat dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui sejumlah program-program ketenagakerjaan.

Unit kerja eselon III di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat masing-masing memiliki tugas dan rincian tugasnya sebagai berikut:

- a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi : Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang; Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan, administrasian keuangan, administrasi kepegawaian dan umum; Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan/ Bagian Tata Usaha Dinas; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian Tugas Sekretariat : Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas; Menyelenggarakan koordinasi, menghimpun bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang; Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan; Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas; Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai Dinas dan UPTD; Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas; Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas dan UPTD; Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas; Menyelenggarakan

pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas; Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP; Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan : Subbagian Perencanaan dan Program; Subbagian Keuangan; Subbagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, aspek pelatihan dan produktivitas, meliputi pelatihan dan pemagangan, penguatan produktivitas serta standarisasi, sertifikasi dan kompetensi kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pelatihan dan pemagangan; Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi pelatihan dan pemagangan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu : Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelatihan dan Produktivitas; Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis pelatihan dan produktivitas; Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pelatihan dan produktivitas; Menyelenggarakan fasilitasi pelatihan dan pemagangan; Menyelenggarakan penguatan produktivitas; Menyelenggarakan standarisasi, sertifikasi dan kompetensi kerja; Menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas, meliputi pelatihan dan pemagangan, penguatan produktivitas standarisasi, sertifikasi dan kompetensi kerja; Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas; Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas; Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang pelatihan dan produktivitas; Menyelenggarakan

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang; Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelatihan dan produktivitas; Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelatihan dan produktivitas sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin seluruh kegiatan Bidang; Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelatihan dan Produktivitas; dan Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahkan: Seksi Pelatihan dan Pemagangan Ketenagakerjaan; Seksi Standardisasi, Seksi Penguatan Produktivitas; Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Kerja.

c. Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, aspek Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi pengembangan dan penyaluran tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun

bahan kebijakan teknis penempatan, perluasan tenaga kerja dan transmigrasi ; Penyelenggaraan penempatan, perluasan tenaga kerja dan transmigrasi; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian Tugas Bidang Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis penempatan, perluasan tenaga kerja dan transmigrasi; Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penempatan, perluasan tenaga kerja dan transmigrasi; Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan penyaluran tenaga kerja; Menyelenggarakan perluasan kesempatan kerja; Menyelenggarakan Ketramigrasian; Menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi pengembangan dan penyaluran tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi; Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang; Menyelenggarakan penyusunan bahan

verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin seluruh kegiatan Bidang; Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja membawahkan: Seksi Pengembangan dan Penyaluran Tenaga Kerja, Seksi Perluasan Kesempatan Kerja, dan Seksi Transmigrasi.

d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, aspek hubungan industrial dan jaminan sosial, meliputi kelembagaan hubungan industrial, pengupahan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan pencegahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi : Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis hubungan industrial dan jaminan sosial; Penyelenggaran hubungan industrial dan jaminan sosial; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial: Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis hubungan industrial dan jaminan sosial; Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi hubungan industrial dan jaminan sosial; Menyelenggarakan kelembagaan hubungan industrial; Menyelenggarakan pengupahan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja; Menyelenggarakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, meliputi kelembagaan hubungan industrial, pengupahan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

dan pencegahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang; Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin seluruh kegiatan Bidang; Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; Dan Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial membawahkan: Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial; Seksi Pengupahan Dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan Seksi Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, aspek pengawasan ketenagakerjaan, meliputi pengawasan norma kerja perempuan anak dan jaminan sosial, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, penegakan hukum dan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan; Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang; Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan: Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis ketransmigrasian; Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi ketransmigrasian; Penyelenggaraan fasilitasi bidang transmigrasi. Rincian Tugas Bidang Transmigrasi : Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis Pengawasan Ketenagakerjaan; Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pengawasan Ketenagakerjaan; Menyelenggarakan pengawasan norma perempuan anak dan jaminan sosial; Menyelenggarakan pengawasan norma keselamatan dan kesejahteraan kerja; Menyelenggarakan penegakan hukum dan sumber daya manusia

pengawas ketenagakerjaan; Menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, meliputi pengawasan norma perempuan anak dan jaminan sosial, pengawasan norma keselamatan dan kesejahteraan kerja, dan penegakan hukum dan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan; Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang; Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin seluruh kegiatan Bidang; Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; dan Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan : Seksi Pengawasan Norma Kerja Perempuan, Anak dan Jaminan Sosial;

Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Seksi Penegakan Hukum dan Sumber Daya Manusia Pengawas Ketenagakerjaan.

f. Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Jawa Barat

Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan ketenagakerjaan meliputi, penyelenggaraan pelatihan, kerjasama dan pemasaran serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Jawa Barat mempunyai fungsi : Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pelatihan ketenagakerjaan; Penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan meliputi penyelenggaraan pelatihan, kerjasama dan pemasaran; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Jawa Barat : Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai; Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelatihan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan; Menyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, penyelenggaraan pelatihan, kerjasama dan pemasaran; Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan ketenagakerjaan di Balai Pelatihan Ketenagakerjaan; Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis

penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan; Penyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan; Menyenggarakan kerjasama dan pemasaran; Menyenggarakan penyiapan yang meliputi perencanaan dan pengembangan analisis kebutuhan pelatihan ketenagakerjaan; Menyenggarakan pelatihan ketenagakerjaan; Menyenggarakan perencanaan dan pengembangan analisis kebutuhan pelatihan ketenagakerjaan; Menyenggarakan penyusunan pengembangan kurikulum dan silabi pelatihan ketenagakerjaan; Menyenggarakan pengembangan kualifikasi dan kompetensi instruktur; Menyenggarakan konsultasi, kemitraan dan kerjasama kelembagaan; Menyenggarakan pemasaran, pengelolaan informasi penyelenggaraan pelatihan; Menyenggarakan pengkajian bahan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelatihan ketenagakerjaan; Menyenggarakan ketatausahaan Balai; Menyenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai; Menyenggarakan penyampaian bahan sarana pertimbangan mengenai pelatihan ketenagakerjaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin seluruh kegiatan Balai; Menyenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Pelatihan Ketenagakerjaan; dan Menyenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

g. Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri

Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan

teknis operasional di bidang pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri dan purna tenaga kerja Indonesia meliputi penyelenggaraan pelatihan, pelayanan dan fasilitasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri. Fungsi Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri : Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri; Penyelenggaraan pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri meliputi penyelenggaraan pelatihan, pelayanan dan fasilitasi; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan rincian tugasnya adalah sebagai berikut: Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai; Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri meliputi penyelenggaraan pelatihan, pelayanan dan fasilitasi; Menyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi penyelenggaraan pelatihan, pelayanan dan fasilitasi; Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri; Menyelenggarakan ketatausahaan; Menyelenggaraan pelatihan; Menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi; Menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan analisis kebutuhan pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI; Menyelenggarakan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI; Menyelenggarakan pengembangan kualifikasi dan

kompetensi instruktur pelatihan TKLN, Purna TKI serta Keluarga TKI; Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga terkait di bidang pelayanan dan pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI; Menyelenggarakan pemasaran, serta pengelolaan informasi di bidang pelayanan dan pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI; Menyelenggarakan pengkajian bahan usulan kebutuhan serta sarana pelatihan TKLN, Purna TKI dan Keluarga TKI; Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi penempatan tenaga kerja indonesia asal daerah Provinsi ke luar negeri dan daerah Kabupaten/Kota; Menyelenggarakan optimalisasi peran satuan tugas TKI asal daerah Provinsi; Melaksanakan pemantauan pelaksanaan layanan terpadu di daerah Kabupaten/Kota; Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap instansi yang terkait penyelenggaraan TKI ke luar negeri; Menyelenggaraan pelayanan pendampingan dan monitoring penempatan, perlindungan dan pemulangan TKI; Menyelenggarakan pengkajian perjanjian kerja antara TKI dengan pengguna, meliputi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak; Menyelenggarakan pelayanan pemberian konsultasi, bimbingan dan pelayanan informasi bagi TKLN; Menyelenggarakan fasilitasi dan bimbingan bagi Purna TKI; Menyelenggarakan ketatausahaan Balai; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai; Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi , kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah

bantuan sosial di Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri; Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan dan pelatihan tenaga kerja luar negeri sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin seluruh kegiatan Balai; Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri; Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

h. Balai Pelatihan Kerja Mandiri

Balai Pelatihan Kerja Mandiri mempunyai tugas pokok : menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan kerja mandiri meliputi penyelenggaraan pelatihan, kerjasama dan pemasaran serta pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Kerja Mandiri. Fungsi Balai Pelatihan Kerja Mandiri : Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pelatihan kerja mandiri; Penyelenggaraan pelatihan kerja mandiri meliputi penyelenggaraan pelatihan, kerjasama dan pemasaran; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugasnya meliputi: Menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai; Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelatihan kerja mandiri dan penyelenggaraan pelatihan kerja mandiri; Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai meliputi penyelenggaraan pelatihan, kerjasama dan pemasaran; Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis

pelatihan kerja mandiri; Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan kerja mandiri; Menyelenggarakan pelatihan kerja mandiri; gMenyelenggarakan kerjasama dan pemasaran; Menyelenggarakan penyiapan pelatihan meliputi perencanaan dan pengembangan analisis kebutuhan pelatihan kerja mandiri; Menyelenggarakan penyusunan pengembangan kurikulum dan silabi pelatihan kerja mandiri; Menyelenggarakan konsultasi, kemitraan dan kerjasama kelembagaan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja mandiri; Menyelenggarakan pengelolaan informasi pelatihan kerja mandiri; Menyelenggarakan pengkajian bahan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelatihan kerja mandiri; Menyelenggarakan penyusunan bahan ajar dan penyediaan alat peraga; Menyelenggarakan pengembangan jejaring pelatihan kerja mandiri; Menyelenggarakan penyusunan analisis usaha; Menyelenggarakan optimalisasi fungsi lahan praktek/demplot sebagai sarana pendukung pelatihan kerja mandiri; Menyelenggarakan ketatausahaan Balai; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai; Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelatihan kerja mandiri sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin seluruh kegiatan Balai; Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Pelatihan Kerja Mandiri; dan Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

i. Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I

Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I . Fungsi dari Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I adalah : Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan; Penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan rincian tugasnya adalah : Menyelenggarakan pengkajian bahan program kerja Balai; Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan; Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengawasan norma kerja serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I ; Menyelenggarakan ketatausahaan; Menyelenggarakan pengawasan norma kerja; Menyelenggarakan

pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai; Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan pengawasan ketenagakerjaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin seluruh kegiatan Balai; Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I ; dan Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

j. Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II . Fungsi dari Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II adalah : Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan; Penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan rincian tugasnya adalah : Menyelenggarakan pengkajian bahan program

kerja Balai; Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan; Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengawasan norma kerja serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II ; Menyelenggarakan ketatausahaan; Menyelenggarakan pengawasan norma kerja; Menyelenggarakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai; Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan pengawasan ketenagakerjaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin seluruh kegiatan Balai; Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II ; dan Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

k. Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III

Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengendalikan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan. Fungsi dari Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III adalah : Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan; Penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan rincian tugasnya adalah : Menyelenggarakan pengkajian bahan program kerja Balai; Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan; Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengawasan norma kerja serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan; Menyelenggarakan ketatausahaan; Menyelenggarakan pengawasan norma kerja; Menyelenggarakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai; Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan pengawasan ketenagakerjaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin seluruh kegiatan Balai; Menyelenggarakan

evaluasi dan pelaporan Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III; dan Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

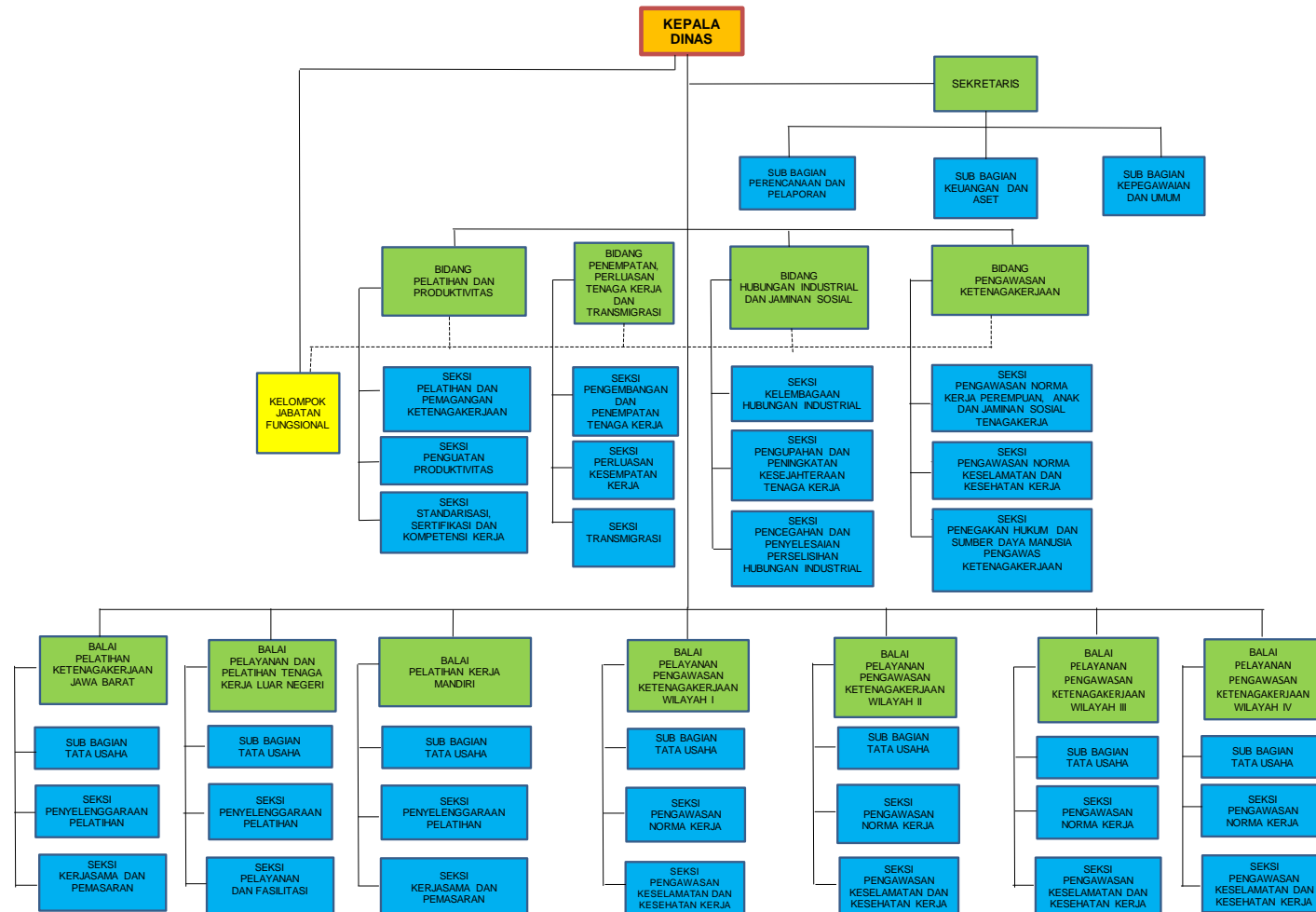
I. Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV

Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV. Fungsi dari Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV adalah : Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan; Penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan rincian tugasnya adalah : Menyelenggarakan pengkajian bahan program kerja Balai; Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan; Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengawasan norma kerja serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan

pengawasan ketenagakerjaan di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV; Menyelenggarakan ketatausahaan; Menyelenggarakan pengawasan norma kerja; Menyelenggarakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai; Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan pengawasan ketenagakerjaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin seluruh kegiatan Balai; Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV; dan Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat





2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Jawa Barat memiliki 196 orang pegawai terdiri atas pejabat struktural sebanyak 33 orang dan pegawai fungsional umum dan fungsional tertentu sebanyak 163 orang. Dengan rincian Pegawai terdiri atas 2 orang golongan I, 30 orang golongan II, 134 orang golongan III dan 30 orang golongan IV.

Adapun komposisi pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PERIODE OKTOBER 2016

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	76	44	120
2	Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	30	11	41
3	Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Luar Negeri	7	11	18
4	Balai Pelatihan Ketransmigrasi dan Kewirausahaan	5	5	10
5	Balai Pelayanan TKI Terpadu	4	3	7
Jumlah		122	74	196

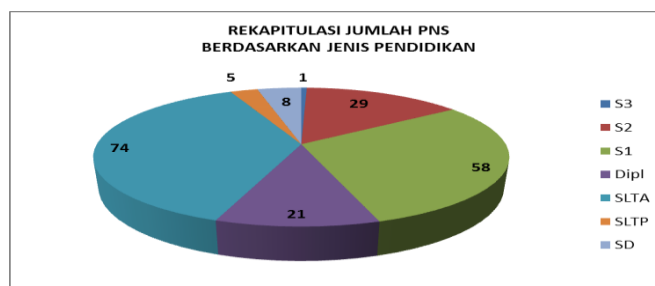


TABEL 2.2

TABEL 2.2

**REKAPITULASI JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PERIODE OKTOBER 2016**

NO	UNIT KERJA	JENIS PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	22	35	6	46	4	6	120
2	Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	0	3	14	10	14	0	0	41
3	Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Luar Negeri	0	2	2	5	9	0	0	18
4	Balai Pelatihan Ketransmigrasi dan Kewirausahaan	0	0	6	0	3	0	1	10
5	Balai Pelayanan TKI Terpadu	0	2	1	0	2	1	1	7
Jumlah		1	29	58	21	74	5	8	196





TABEL 2.3

**REKAPITULASI JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG DAN ESELON
PERIODE OKTOBER 2016**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN					ESELON		
			I	II	III	IV		II	III	IV
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	120	1	19	84	16		1	5	15
2	Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	41	0	4	30	7		0	1	2
3	Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Luar Negeri	18	0	4	12	2		0	1	3
4	Balai Pelatihan Ketransmigrasi dan Kewirausahaan	10	0	2	5	3		0	1	3
	Jumlah	196	2	30	134	30		1	8	24



Jika dilihat dari komposisi pegawai berdasarkan golongan, mayoritas pegawai non-struktural di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah golongan III sebesar 68,37% dari total pegawai. Dengan demikian, kekuatan sumber daya manusianya dapat dikatakan baik.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Pelayanan publik mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1) yaitu kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian kinerja pelayanan terhadap publik tertuang dalam Tabel 2.4.



TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah Tenaga Kerja Terlatih Tahun 2013 Sebanyak 20.790 Orang			-	2,280	4,350	4,960	4,590	4,610	1,828	1,824	2,610	4,790	1.891	80	42	53	104	41
	<i>a. Berbasis kompetensi</i>	60% dari Σ pendaftar		-	480	1,550	960	590	510	528	384	720	400	336	110	25	75	68	65
	<i>b. Berbasis masyarakat</i>	-		-	1,300	1,600	1,500	1,300	1,300	1,300	1,200	1,500	2,250	1.240	100	75	100	173	95
	<i>c. Berbasis Produktivitas dan Kewirausahaan</i>	60% dari Σ pendaftar		-	500	1,200	2,500	2,700	2,800	-	240	390	2,140	315	-	20	16	79	11
2.	Jumlah tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi Tahun 2013	-		-	200	780	1,500	1,170	1,500	200	300	320	493	280	100	38	21	42	18
3.	Jumlah calon TKI asal Jawa Barat terlatih dan mempunyai sertifikat kompetensi tahun 2013	-		-	-	100	2,600	1,240	1,600	-	100	2,600	2,400	1.600	-	100	100	194	100
4.	Jumlah tenaga kerja yang diseleksi dan dimagangkan (Jabar)			-	900	1,200	1,300	1,440	1,440	900	1,280	1,200	1,700	420	100	107	92	118	46
	<i>- Magang Dalam negeri</i>	-		-	600	700	800	840	840	600	780	700	500	120	100	111	88	60	14
	<i>- Seleksi magang Luar negeri</i>	-		-	300	500	500	600	600	300	500	500	1,200	300	100	100	100	200	50
5.	Jumlah kepala keluarga calon transmigran terlatih dasar-dasar pertanian	-		-	-	580	596	740	1,000	-	570	523	642	289	-	98	88	87	29



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
6.	Jumlah istri calon transmigran yang terlatih di bidang pengolahan hasil pertanian	-		-	-	-	25	150	300	-	-	25	90	16	-	-	100	60	5,3
7.	Jumlah anak calon transmigran terlatih adaptasi lingkungan	-		-	-	-	-	180	600	-	-	-	180	28	-	-	-	100	4,6
8.	Jumlah masyarakat resettlement terlatih di bidang usaha ekonomi produktif	-		-	-	160	280	240	420	-	160	280	270	570	-	100	100	113	135
9.	Jumlah lembaga latihan kerja yang terakreditasi	-		-	200	300	360	400	500	33	33	67	33	26	17	11	19	8	5,2
10.	Jumlah transmigran yang bertahan di lokasi transmigran lebih dari 5 tahun	-		-	650	650	650	650	650	257	652	652		570	40	100	100	-	87
11.	Jumlah penyerapan tenaga kerja Jawa Barat tahun 2013 pada 9 sektor 2.000.000 orang	-		-	305,000	345,000	400,000	450,000	500,000	255,485	560,344	218,464	51,879	207.955	84	162	55	12	41
12.	Persentase Tenaga Kerja Jawa Barat Yang Tersalurkan Dari Angkatan Kerja Yang Tersedia Pada Tahun 2018 Sebanyak 18%	40% dari Σ pencari kerja terdaftar		-	18	18	18	18	18	1	3	1	0	3	7	16	6	1	16
13.	Persentase pertumbuhan penempatan AKL tiap tahun 13%	-		-	13	13	13	13	13	91	276	86		0	703	2,124	660	-	-
14.	Persentase pertumbuhan penempatan AKAD tiap tahun 10%	-		-	5	10	10	15	10	95	40	17	-	NA	1,891	402	173	-	-
15.	Persentase pertumbuhan penempatan AKAH tiap tahun 10%	-		-	5	10	10	15	15	94	22	25	-	NA	1,877	223	249	-	-
16.	Persentase Tingkat Pengangguran Tahun 2013 Sebanyak 9%	-		-	13	12	11	10	9	11	10	10	10	12	84	86	89	98	133



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
17.	Persentase pemeriksaan ketenagakerjaan 45% pada tahun 2013	45% dari Σ perusahaan terdaftar		-	25	30	35	40	45	25	30	35	40	15	100	100	100	100	33
18.	Persentase pengujian objek pengawasan K3 50% pada tahun 2013	50% dari Σ peralatan terdaftar		-	30	35	40	45	50	30	35	40	45	20	100	100	100	100	40
19.	Persentase pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	50% dari Σ pekerja/buruh		-	30	35	40	45	50	30	35	40	45	69.86	100	100	100	100	139
20.	Persentase penurunan kasus TKI per tahun 10%	-		-	125	113	102	92	83	39	92	137	89	94	31	81	134	97	113
21.	Persentase Tenaga kerja Yang Memperoleh Pendapatan Sama Dengan atau Diatas UMK (\geq UMK) Pada Tahun 2013 Sebanyak 100%	-		-	80	85	90	95	100	99	99	98	100	100	124	117	109	105	100
22.	Persentase pelayanan penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Pada Tahun 2013 Sebanyak 80%	50% dari Σ kasus tercatat		-	80	80	80	80	80	93	113	92	41	94	117	142	116	52	117
23.	Persentase Penurunan Kecelakaan Kerja per tahun 10%	-		-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	39	100	100	100	100	390
24.	Persentase penyidikan Kasus ketenagakerjaan 10% per tahun	-		-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	39	100	100	100	100	390
25.	Persentase transmigran yang ditempatkan memperoleh hak-hak dasarnya 100% setiap tahun	-		-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26.	Jumlah Kelompok usaha bersama (KUB)	-		-	-	-	21	10	17	-	-	21	10	16	-	-	100	100	94
27.	Jumlah Kerjasama Dengan investor Sebanyak 2 Kali	-		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
28.	Jumlah kerjasama dengan asosiasi profesi	-		-	20	20	25	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tahun 2013, 100%	-		-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30.	Persentase Pemenuhan Pelaporan 100%	-		-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31.	Persentase Aparatur yang meningkat jenjang pendidikan teknis 20% per tahun	-		-	20	20	20	20	20	3	11	8	0	100	13	53	41	2	500
32.	Persentase Aparatur fungsional Yang Bersertifikat Profesi Ketenagakerjaan Tahun 2013 Sebanyak 100%	-		-	100	100	100	100	100	11	11	6	-	100	11	11	6	-	100
33.	Persentase Aparatur Yang Bersertifikat Profesi Ketransmigrasian Tahun 2013 Sebanyak 100%	-		-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34.	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kedinasan 100%	-		-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35.	Angka Index Kepuasan Tenaga Kerja Tahun 2013 80%	-		-	24	24	24	24	24	-	-	80.23	73.62	84.74	NA	NA	100	100	100
36.	Angka Index Kepuasan Transmigran Tahun 2013 80%	-		-	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100	100	100	100	100
				-	2,280	4,350	4,960	4,590	4,610	1,828	1,824	2,610	4,790	-	80	42	53	104	-



Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dilihat dari indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah. Capaian indikator ini untuk menjaga konsistensi agar kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.



TABEL 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah																	
Kegiatan Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	704	249	1,057	679	1,500	703	249	1,057	675	1,827	99.75	99.98	100.00	99.49	95,93	198	99.03
Kegiatan Pengembangan Perencanaan Pelatihan Ketenagakerjaan	0	0	0	56	350	0	0	0	51	333	0.00	0.00	0.00	91.23	99.47	87	38.14
Kegiatan Pengembangan Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	0	0	0	1,567	550	0	0	0	1,521	1,011	0.00	0.00	0.00	97.07	183.97	137	56.21
Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Pelatihan Ketransmigrasian	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0.00	0.00	0.00	0.00	100	62	20
Kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	676	0	0	0	0	674	0	0	0	0	99.63	0.00	0.00	0.00	0	169	19.93



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																	
Kegiatan Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Keliling (MTU)	3,822	0	3,381	3,453	3,650	3,768	0	3,355	3,795	3,588	98.58	0.00	0.00	0.00	98.31	-43	39.38
Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat	3,521	0	3,381	3,453	0	3,351	0	3,355	3,795	0	95.19	0.00	0.00	0.00	0	880	19.04
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	3,997	740	1,006	914	1,350	3,991	739	1,005	905	2,356	99.87	99.89	99.87	98.97	174.55	661	114.63
Pelatihan berbasis kompetensi	3,822	1,847	3,093	2,460	3,281	3,768	846	3,079	2,442	3,270	98,58	99.91	99.54	99.28	0.10	135	79.48
Peningkatan standarisasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja	0	496	975	950	1,100	0	496	945	945	1.043	0.00	100.00	96.99	99.51	94.90	275	78.28
pelatihan berbasis masyarakat melalui mobile training unit dan pemagangan tenaga kerja	0	1,557	3,381	3,829	3,650	0	1,550	3,355	3,795	3,588	0.00	99.53	99.23	99.12	98.31	912	79.24



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelatihan tenaga kerja luar negeri	0	484	0	0	6.750	0	484	0	0	6.991	0.00	99.97	0.00	0.00	103.57	1.687	40.71
Pelatihan peningkatan kewirausahaan pada tenaga kerja industri tembakau	0	400	0	0	1.350	0	399	1.005	905	1.282	0.00	99.95	0.00	0.00	94.98	337	38.99
Pembinaan kemampuan dan keterampilan masyarakat dilingkungan industri tembakau	0	410	0	0	0	0	404	0	0	0	0.00	98.59	0.00	0.00	0	0	19.72
Kegiatan Pelatihan Persiapan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri	0	0	1,914	0	0	0	0	1,821	0	0	0.00	0.00	95.15	0.00	0	0	19.03
Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bahasa Asing, Komputer dan Kemampuan Lainnya bagi Pencari Kerja di Luar Negeri	0	0	13,036	0	0	0	0	12,012	0	0	0.00	0.00	92.15	0.00	0	0	18.43
Kegiatan Pelatihan Teknis Produksi Industri Kecil Menengah di BPK Bekasi	0	0	421	0	2.632	0	0	421	0	2.356	0.00	0.00	100.00	0.00	89.52	658	37.90



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Pembinaan Keterampilan Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau di Jawa Barat (di BPK Bekasi)	0	0	1,499	1,798	2.704	0	0	1,294	1,735	2.683	0.00	0.00	86.37	96.52	99.22	676	56.42
Kegiatan Pelatihan Bagi Pencari Kerja ke Luar Negeri	0	0	0	7,525	6,750	0	0	0	7,325	699	0.00	0.00	0.00	97.35	103.57	1.687	40.18
Program Perlindungan dan Pembangunan Lembaga Ketenagakerjaan																	
Peningkatan Jaminan Sosial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	0	998	790	1,200	850	0	998	756	1,185	992	0.00	99.95	95.75	98.80	116.74	212	82.25
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	1,870	748	1,172	866	1,050	1,856	747	1,098	860	1.041	99.30	99.77	93.73	99.41	99.16	-205	98.27
Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial	2,340	344	1,147	873	1,000	2,237	344	1,136	833	998	95.62	99.98	99.06	95.48	99.88	-335	98
Kegiatan Pengkajian Standar KHL di Provinsi Jabar	476	0	0	0	0	463	0	0	0	0	97.20	0.00	0.00	0.00	0	-119	19.44



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Penerapan Norma K3 pada kelompok Masyarakat Pengelola Tembakau	470	1,100	199,	0	0	463	1,089	199,	0	0	98.72	99.06	100.00	0.00	0	-117	59.56
Kegiatan Bimtek Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Industri Tembakau	0	0	299	0	0	0	0	296	0	0	0.00	0.00	99.00	0.00	0	0	19.8
Kegiatan Perlindungan Hukum Terhadap TKI Asal Jawa Barat	0	0	750	0	0	0	0	707	0	0	0.00	0.00	94.36	0.00	0	0	18.87
Program Peningkatan Kesempatan Kerja																	
Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Perdesaan Berbasis Pemuda & Perempuan	7,279	4,402	5,163	8,836	6,750	7,247	4,360	5,142	8,826	9.037	99.56	99.04	99.60	99.88	133.88	-132	106.39
Kegiatan Penyiapan Penyaluran Tenaga Kerja Dalam, Luar Negeri dan Penyebaran IPK	3,639	0	0	0	0	3,409	0	0	0	0	93.69	0.00	0.00	0.00	0	-909	18.74



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penempatan Tenaga Kerja AKL,AKAD/AKAN	0	694	1,174	687	800	0	693	1,142	636	2.640	0.00	99.87	97.25	92.68	330.07	2.000	123.97
Pengembangan Transformasi Informasi Pasar Kerja/Bursa Kerja	0	299	574	1,255	1,450	0	297	567	1,246	1.411	0.00	99.56	98.83	99.32	97.34	362	79.01
Kegiatan Peningkatan Peran Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu	0	0	0	959	1,350	0	0	0	910	1.783	0.00	0.00	0.00	94.85	132.12	337	45.39
Konsolidasi Pencapaian Pembangunan Ketenagakerjaan Jawa Barat	0	500	0	0	0	0	496	0	0	0	0.00	99.23	0.00	0.00	0	0	19.85
Kegiatan Peningkatan Keterampilan Berwirausaha Bagi Calon TKI Antisipasi Dampak Moratorium ke Arab Saudi	0	0	1,911	0	0	0	0	1,902	0	0	0.00	0.00	99.55	0.00	0	0	19.91
Kegiatan Pelatihan Keterampilan untuk Tenaga Kerja pada industri Garmen di Kab. Subang melalui mekanisme antar kerja Lokal	0	0	2,145	0	0	0	0	2,138	0	0	0.00	0.00	99.67	0.00	0	0	19.93.



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor																	
Kegiatan Pengadaan Barang/Prasarana Kantor Disnakertrans	1,000	1,942	1,549	985	1,100	990	1,940	1,454	974	1.232	99.01	99.92	93.88	98.93	112.02	25	100.75
PENGADAAN BARANG/PRASARANA KANTOR BPK BEKASI	0	480	242	0	550	0	480	225	0	542	0.00	99.89	92.88	0.00	98.71	137	58.30
Kegiatan Pengadaan Barang/Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri	0	0	606	0	20	0	0	595	0	724	0.00	0.00	98.16	0.00	3491.61	5	717.95
Kegiatan Pengadaan Barang/Prasarana Kantor Balai Pelatihan Transmigrasi	0	0	234	0	314	0	0	234	0	314	0.00	0.00	99.87	0.00	100	78	39.95
Pengadaan Sarana Dan Prasarana BPTKI Terpadu Prov. Jabar	0	0	0	0	368	0	0	0	0	362	0.00	0.00	0.00	0.00	98.45	92	19.69
Rehabilitasi Gedung BPK Bekasi Tahap II	0	1,297	0	0	0	0	1,296	0	0	0	0.00	99.92	0.00	0.00	0	0	19.98
Rehabilitasi Bangunan Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri	0	413	403	0	0	0	412	400	0	0	0.00	99.90	99.31	0.00	0	0	39.84



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rehabilitasi bangunan gedung kantor balai latihan transmigrasi	0	420	571	274	274	0	419,	571	274	274	0.00	99.76	99.99	0.00	99.33	68	59.82
Kegiatan Revitalisasi UPTD Balai Pelatihan Ketenagakerjaan	0	0	0	925	0	0	0	0	853	0	0.00	0.00	0.00	92.28	0	0	18.46
Kegiatan Revitalisasi Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	0	0	0	1,139	0	0	0	0	1,076	0	0.00	0.00	0.00	94.52	0	0	18.90
Kegiatan Revitalisasi Balai Pelatihan Ketramsmigrasian	0	0	0	571	0	0	0	0	567	0	0.00	0.00	0.00	99.30	0	0	19.85
Kegiatan Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan TKI Terpadu Prov.Jabar	0	0	0	516	0	0	0	0	493	0	0.00	0.00	0.00	95.67	0	0	19.13
Kegiatan Pembangunan Asrama Siswa Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	0	0	0	4,599	3,500	0	0	0	4,261	3270	0.00	0.00	0.00	92.65	93.44	875	37.22
Kegiatan Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas Balai Pelatihan Ketramsmigrasian	0	0	0	1,348	1,345	0	0	0	1,348	1,345	0.00	0.00	0.00	100.00	100	336	40
Pembangunan gedung asrama BLTKLN	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	724	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	375	9.6



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengembangan Transmigrasi																	0
Kegiatan Pengerahan, Pembinaan dan Pemberdayaan Transmigrasi	1,943	1,166	0	0	0	1,790	988	0	0	0	92.13	84.72	0.00	0.00	0	-485	35.37
Pengerahan dan Pemindahan Transmigran	0	0	1,225	806	1,058	0	0	1,190	776	966	0.00	0.00	97.12	96.23	91.32	264	56.93
Pemberdayaan Masyarakat Transmigran Lokal (Resettlement)	0	0	505	780	709	0	0	502	771	704	0.00	0.00	99.58	98.90	99.37	177	59.57
Pelatihan Ketransmigrasian	0	496	965	1,003	1,250	0	495	960	1,003	1,250	0.00	99.78	99.47	100.00	100	250	79.85
Kegiatan Persiapan Pemindahan Transmigran	0	0	0	950	282	0	0	0	813	251	0.00	0.00	0.00	85.63	89.03	70	34.93
Pelatihan pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal (resettlement)	0	496	975	1,008	1,250	0	495	975	1,008	1,250	0.00	99.79	100	100	100	312	20
Pelatihan calon transmigran	0	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0.00	0.00	0.00	0.00	100	135	20



Secara umum rasio antara pagu anggaran dengan realisasi keuangannya di atas 90%. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak mengalami persoalan yang cukup berarti.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Pada bulan Agustus 2016 angkatan kerja berjumlah 21.075.899 orang, sedangkan pada Agustus 2015 sebanyak 20.586.356 orang, atau mengalami penambahan sebesar 489.543 orang pada kurun waktu satu tahun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik, dari 60,34% pada Agustus 2015 menjadi 60,65% pada Agustus 2016.

Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Agustus 2016 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2015. Pada bulan Agustus 2016 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 19.202.038 orang, mengalami kenaikan 410.556 orang dibandingkan Agustus tahun 2016 sebanyak 18.791.482 orang atau naik 2,18 persen.

Lapangan usaha yang berhasil menyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 adalah perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi; industri; jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan; serta pertanian.

Penduduk Jawa Barat yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan merupakan komposisi tertinggi, yaitu



sebanyak 9 juta orang (47,34%), diikuti berusaha sendiri sebesar 3,48 juta orang (18,14%), dan yang bekerja sebagai pekerja bebas 2,64 juta orang (13,79%). Sementara pekerja formal sebesar 51,36% dan informal 48,64%.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah angkatan kerja terbanyak menimbulkan dua sisi dampak yang harus diperhatikan. Dampak yang pertama adalah tantangan untuk mengisi kesempatan kerja. Angkatan kerja yang masuk pasar kerja harus memiliki keterampilan yang memadai, baik sebagai pekerja/buruh maupun sebagai pekerja mandiri dan pekerja mandiri plus. Menjadi pekerja di perusahaan atau berwirausaha masing-masing memiliki tantangan yang unik karena bidang garapan yang berbeda. Bekerja di perusahaan lebih diutamakan kemampuan *hardskill* dengan situasi dan kondisi yang dihadapi sama setiap hari. Setiap pekerja sudah jelas bagian pekerjaannya dan relatif berada di tempat yang statis untuk jangka waktu panjang. Oleh karena itu, pekerja di perusahaan harus menghadapi situasi bekerja mekanis. Sementara itu berwirausaha lebih menonjolkan kemampuan *softskill* karena situasi pekerjaan yang memungkinkan seorang wirausaha menghadapi tantangan yang berbeda setiap hari. Banyak wirausaha yang memiliki latar belakang akademis berbeda dengan dunia usaha yang digelutinya. Hal ini berarti bahwa menjadi wirausaha tidak bekerja secara mekanis.

Meskipun pekerja di perusahaan bekerja mekanis, namun adakalanya pekerjaan kurang sesuai dengan bekal ilmu formal di bangku sekolah. Keterampilan pekerja harus selalu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi. Dari kondisi tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan



bahwa meski tantangan yang dihadapi oleh angkatan kerja agar dapat diserap pasar kerja berbeda-beda, namun bermuara pada satu kebutuhan, yaitu peningkatan kompetensi tenaga kerja. Bagi pencari kerja ataupun pekerja, bekal dari bangku sekolah saja kadang tidak cukup untuk memenuhi permintaan penyedia kerja. Apalagi jika dihadapkan pada kenyataan bahwa pasar kerja di Jawa Barat terbuka bagi siapapun, sehingga mereka harus berkompetisi dengan pencari kerja atau pekerja dari luar Jawa Barat yang ingin masuk ke daerah Jawa Barat. Demikian juga dengan angkatan kerja yang hendak menjadi pekerja mandiri diperlukan bekal khusus agar tumbuh dan berkembang menjadi wirausaha yang sukses.

Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sesuai tugas dan fungsinya adalah menyediakan akses terhadap upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja agar angkatan kerja dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Jika angkatan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, maka akan menciptakan pengangguran. Angkatan kerja besar berpotensi menciptakan pengangguran yang besar pula.

Dampak yang kedua adalah dengan adanya angkatan kerja yang besar akan menyediakan sumber daya manusia yang melimpah pada usia masih produktif. Tenaga kerja sebagai motor penggerak ekonomi wilayah, memiliki arti bahwa seandainya pembangunan Jawa Barat terus tumbuh positif maka harus didukung oleh ketersediaan tenaga kerja secara kontinu.

Untuk melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, yang dilakukan melalui: (1)



Peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan; dan (2) Peningkatan hubungan industrial yang harmonis melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya pengembangan ketenagakerjaan antara lain adalah :

a. Pada masa sebelum bekerja:

1. Kualitas tenaga kerja masih rendah,
2. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata,
3. Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah,
4. Rendahnya akses terhadap lapangan kerja.

b. Pada masa selama bekerja:

1. Produktivitas tenaga kerja masih rendah,
2. Hubungan Industrial belum kondusif,
3. Kesejahteraan pekerja / buruh masih rendah,
4. Perlindungan tenaga kerja masih rendah.

c. Pada masa setelah bekerja:

1. Peluang untuk bekerja kembali terbatas,
2. Minat untuk berwirausaha setelah bekerja rendah,



3. Fasilitas purna tenaga kerja terbatas.

Sedangkan permasalahan utama di bidang ketransmigrasian adalah :

1. Alokasi target penempatan calon transmigran terbatas,
2. Ketidaksesuaian antara keterampilan calon transmigran dengan kebutuhan daerah penempatan,
3. Manajemen penyelenggaraan transmigrasi dalam bentuk Kerjasama Antar Daerah sulit diimplementasikan;
4. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat transmigrasi lokal (*resettlement*) dalam menumbuhkembangkan jiwa wirausaha.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain dengan menyusun Kebijakan Program Prioritas Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian untuk mencapai :

1. Peningkatan daya saing tenaga kerja,
2. Pendukung penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat disabilitas,
3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa melalui penciptaan 2 juta serapan tenaga kerja baru dan mendukung penciptaan 100.000 wirausaha baru di Jawa Barat,



4. Perluasan kesempatan kerja, peningkatan pelayanan kesempatan kerja dan pelayanan informasi bursa kerja,
5. Membina sarana hubungan industrial,
6. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh,
7. Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat,
8. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi purna tenaga kerja,
9. Peningkatan dan pengembangan kemampuan serta keterampilan wirausaha muda,
10. Pendukungan terhadap terwujudnya kerjasama antar-daerah bidang ketrasmigrasian melalui forum KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Transmigrasi,
11. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat terdapat permasalahan yang sangat kompleks dan multidimensional. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan secara umum sebagai berikut :

1. Kualitas tenaga kerja masih rendah

Fakta ini dapat dilihat dari komposisi angkatan kerja di Jawa Barat menurut tingkat pendidikan. Terlihat dari data pada Tabel 2.6, bahwa penduduk yang bekerja didominasi oleh mereka yang hanya berpendidikan SD ke bawah (41,52%). Proporsi terbesar kedua adalah mereka yang memiliki pendidikan sekolah menengah pertama (sekitar 26,53 persen). Hal yang menarik adalah ternyata yang bekerja dengan pendidikan Universitas hanya sekitar 9,5 persen saja dari total pekerja.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi didominasi oleh yang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan , yaitu sebesar 16,51 persen. TPT untuk tamatan SD ke bawah sebesar 5,87 persen. Untuk SMP sebesar 10,52 persen dan Diploma sebesar 8,26 persen.



TABEL 3.1

**Penduduk Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Pendidikan, Agustus 2016**

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Total	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<= SD	7.972.841 (41,52%)	497.627 (26,56%)	8.470.468 (40,19%)	5,87
SMP	3.395.436 (17,68%)	399.038 (21,29%)	3.794.474 (18,00%)	10,52
SMA Umum	3.226.929 (16,81%)	415.290 (22,16%)	3.642.219 (17,28%)	11,40
SMA Kejuruan	2.072.419 (10,79%)	409.897 (21,87%)	2.482.316 (11,78%)	16,51
Diploma I/II/III	696.71 (3,63%)	62.738 (3,35%)	759.456 (3,60%)	8,26
Universitas	1.873.695 (9,5 %)	89.271 (4,76%)	1.926.966 (9,14%)	4,63
Total	19.202.038 (100,00%)	1.873.861 (100,00%)	21.075.899 (100,00%)	8,89

Sumber: BPS, 2016

2. Persebaran tenaga kerja tidak merata

Pada Tahun 2014 penduduk Jawa Barat yang bekerja menurut lapangan usaha dan daerah tidak merata persebarannya. Penduduk yang bekerja di perkotaan sebanyak 12.742.751 orang, lebih banyak dibandingkan di perdesaan yang hanya 6.701.032 orang dari jumlah 19.443.783 penduduk yang bekerja.

3. Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh yang berpendidikan SD (26,56%) dan SMA (22,16%). Sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat Diploma yaitu hanya sebesar 3,35 %.



TABEL 3.2

**Penduduk Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Pendidikan, Agustus 2016**

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Total	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<= SD	7.972.841 (41,52%)	497.627 (26,56%)	8.470.468 (40,19%)	5,87
SMP	3.395.436 (17,68%)	399.038 (21,29%)	3.794.474 (18,00%)	10,52
SMA Umum	3.226.929 (16,81%)	415.290 (22,16%)	3.642.219 (17,28%)	11,40
SMA Kejuruan	2.072.419 (10,79%)	409.897 (21,87%)	2.482.316 (11,78%)	16,51
Diploma I/II/III	696.71 (3,63%)	62.738 (3,35%)	759.456 (3,60%)	8,26
Universitas	1.873.695 (9,5 %)	89.271 (4,76%)	1.926.966 (9,14%)	4,63
Total	19.202.038 (100,00%)	1.873.861 (100,00%)	21.075.899 (100,00%)	8,89

Sumber: BPS, 2016

4. Rendahnya akses terhadap kesempatan kerja

Lowongan pekerjaan seharusnya tersedia di setiap dinas yang membidangi ketenagakerjaan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan. Namun pada kenyataannya informasi pasar kerja masih belum secara kontinu diperbaharui oleh dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota.

5. Produktivitas tenaga kerja masih rendah

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Barat masih tergolong rendah, dipicu tingkat kualitas kompetensi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Secara makro tingkat produktivitas tenaga kerja di Jabar masih relatif rendah.



Kesempatan kerja yang tersedia belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya oleh pencari kerja karena keterampilan dan kompetensi yang dianggap belum sesuai.

Sektor yang paling rendah tingkat produktivitasnya terdapat pada industri padat karya, dimana banyak menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA. Kondisi ini membuat industri menjadi lebih berat karena tidak mampu mengejar kapasitas produksi sehingga daya saing menjadi rendah dibanding produk impor. (Sumber:

<http://industri.bisnis.com/read/20140409/12/218171/produktivitas-tenaga-kerja-masih-rendah>).

6. Hubungan industrial belum kondusif

Sepanjang tahun 2015 tercatat jumlah kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 415 kasus dan melibatkan 6.604 orang tenaga kerja.

7. Kesejahteraan pekerja/buruh masih rendah

Meskipun telah ditetapkan ILO bahwa jam kerja efektif adalah 8 (delapan) jam sehari dan 40 jam seminggu, akan tetapi kenyataannya masih banyak jam kerja yang melebihi ketentuan tersebut. Bahkan secara mendasar hasil produksi kaum buruh yang menyumbang pendapatan negara tidak sebanding dengan kesejahteraan dari kaum buruh itu sendiri. Karena upah buruh di Indonesia masih rendah. (Sumber: <http://jabar.tribunnews.com/2012/04/28/upah-buruh-dirasakan-masih-rendah>).



8. Perlindungan tenaga kerja masih rendah

Salah satu indikasi bahwa pekerja/buruh masih merasakan rendahnya upaya perlindungan adalah maraknya unjuk rasa/mogok kerja.

Selain itu, indikasi lain dari rendahnya perlindungan tenaga kerja adalah masih adanya pelanggaran ketenagakerjaan. Pada tahun 2013, data yang ada menunjukkan beberapa indikasi pelanggaran ketenagakerjaan antara lain : pelanggaran yang direkap berdasarkan laporan Permenakertrans RI No. 9 Tahun 2005 tercatat sebanyak 1.606 pelanggaran yang dilakukan oleh 664 perusahaan; hanya ada 301 perusahaan yang masih memiliki kesadaran untuk memenuhi UU No. 7 Tahun 1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan; Perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan UMK tercatat sebanyak 154 kasus; Pelanggaran PP/PKB sebanyak 190 kasus; Perusahaan hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerja untuk Program Jamsostek sebanyak 170 perusahaan; Tingkat kecelakaan kerja di Jawa Barat masih cukup tinggi, yaitu 22.438 kasus; dan Realisasi klaim jaminan yang dibayarkan Rp 89.753.868.735 pada Tahun 2013, menurun dari Rp 131.662.000.000 pada Tahun 2012.



9. Peluang untuk bekerja kembali terbatas

Dalam beberapa tahun ini, model perekrutan calon pegawai yang dilaksanakan oleh perusahaan banyak mencari *fresh graduates*. *Fresh graduates* dianggap relatif lebih mudah untuk dibentuk sesuai dengan budaya kerja perusahaan karena belum memiliki pengalaman bekerja di tempat lain. Di satu sisi hal ini berdampak positif untuk penyerapan angkatan kerja baru, tetapi di sisi lain mengurangi kesempatan bagi angkatan kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

10. Minat untuk berwirausaha setelah bekerja rendah

Data BPS pada tahun 2016 menyebutkan bahwa penduduk Jawa Barat yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan merupakan komposisi tertinggi, yaitu sebanyak 9 juta orang (47,34%), diikuti berusaha sendiri sebesar 3,48 juta orang (18,14%), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap 1,98 juta orang (10,33%). Sementara itu pekerja formal sebesar 51,36% dan informal 48,64%.

11. Fasilitas purna kerja terbatas

Sejalan dengan rendahnya minat berwirausaha purna kerja, fasilitas bagi purna kerja juga masih terbatas. Berwirausaha bagi purna kerja perlu untuk difasilitasi, mengingat masih banyaknya purna kerja, baik yang berasal dari pekerja antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah, maupun pekerja antar kerja antar negara yang perlu dibimbing agar mampu mandiri.



12. Alokasi target penempatan calon transmigran

Alokasi target penempatan calon transmigran ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Penetapan target ini menjadi permasalahan bagi daerah pengirim, termasuk Jawa Barat. Setiap tahun alokasi target pengiriman berkurang. Pada tahun 2012 target pengiriman yang diterima oleh Jawa Barat sebanyak 685 kepala keluarga (KK), kemudian berkurang menjadi 435 KK pada tahun 2013. Tahun 2014 alokasi target kembali berkurang menjadi hanya 108 KK. Tahun 2015 alokasi target sebanyak 251 KK dan tahun 2016 sebanyak 262 KK Sementara animo masyarakat untuk bertransmigrasi sangat tinggi dan selalu bertambah setiap tahun.

13. Ketidaksesuaian antara keterampilan dasar calon transmigran dengan kebutuhan daerah penempatan

Kurangnya informasi antara pusat dengan daerah menyebabkan calon transmigran menghadapi kondisi yang sulit. Kesulitan calon transmigran dalam menghadapi perbedaan karakteristik fisik daerah penempatan dengan daerah asal calon transmigran, sehingga calon transmigran harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan karakter daerah yang akan ditempatinya nanti. Penetapan daerah penempatan transmigran saat ini masih menjadi kewenangan Kemnakertrans RI, sedangkan pelatihan calon transmigran dapat diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi ketransmigrasian.

14. Manajemen penyelenggaraan transmigrasi dalam bentuk Kerja Sama Antar Daerah sulit diimplementasikan.



Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dimaksudkan untuk sinkronisasi pelaksanaan ketransmigrasian antara daerah pengirim dengan daerah penempatan. Pada kenyataannya KSAD ini sulit untuk ditindaklanjuti pasca-penempatan transmigran. Hal ini disebabkan oleh penetapan target penempatan masih menjadi kewenangan Kementerian terkait.

15. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat transmigrasi lokal (*resettlement*) dalam menumbuhkembangkan jiwa wirausaha

Rendahnya kemampuan dan keterampilan warga translok karena lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK) masyarakat translok di 21 UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) di 11 Kabupaten se-Jawa Barat hidup dengan penghasilan yang sangat rendah, tingkat pendidikan yang relatif rendah (hanya sampai dengan sekolah dasar), sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai serta akses menuju lokasi *resettlement* yang sulit dijangkau.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 :

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.



Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, ***Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.*** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu manusia Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

Misi Kedua, ***Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan.*** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu ekonomi Jawa Barat yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan berkeadilan.

Misi Ketiga, ***Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik.*** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional, akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan.



Misi Keempat, ***Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan

Misi Kelima, ***Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Peran pemuda, Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat yang tangguh.

Dengan memperhatikan penjabaran misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi pertama.

Faktor penghambat pencapaian misi pertama tersebut antara lain rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Jawa Barat, sistem perlindungan ketenagakerjaan yang belum jelas dan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal alokasi pengiriman transmigran.

Sementara itu faktor pendorong pencapaian misi yang terkait dengan tugas fungsi OPD antara lain sumber daya alam mendukung pertumbuhan ekonomi, baik berupa kekayaan alam maupun posisi strategis Jawa Barat di antara DKI Jakarta dan Jawa Bagian Timur.



3.3 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan R.I. dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi R.I. serta Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

A. Arah Kebijakan

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional

Dalam rangka mendukung agenda dan sasaran pembangunan bidang ekonomi, kebijakan dan strategi pembangunan diarahkan untuk :

- a. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global;
- b. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan dilaksanakan;
- c. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan;
- d. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan yang dilaksanakan;
- e. Memfungsikan pasar tenaga kerja yang dilaksanakan;
- f. Memperluas kerja sama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran yang dilaksanakan;
- g. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan yang dilaksanakan;



- h. Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian yang dilaksanakan;
- i. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan disebut dengan NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu :

- a. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
- b. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
- c. Percepatan Sertifikasi Profesi;
- d. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
- e. Penguatan Wirausaha Produktif;
- f. Penciptaan Hubungan Industrial yang sehat dan produktif;
- g. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
- h. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
- i. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.



2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketransmigrasian dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, tujuan yang akan dicapai terkait dengan ketransmigrasian adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah.

Fokus Prioritas :

Pembangunan dan Pengembangan Satuan Permukiman (SP) sebagai Pusat Satuan Kawasan Pengembangan.



3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merespons kebijakan nasional melalui prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam 10 (sepuluh) *Common Goals*, meliputi :

1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
3. Infrastruktur wilayah, energi dan air baku;
4. Ekonomi pertanian;
5. Ekonomi non pertanian;
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan;
7. Pengelolaan seni, budaya, wisata serta kepemudaan;
8. Ketahanan keluarga dan kependudukan;
9. Kemiskinan, PMKS dan keamanan;
10. Tata kelola pemerintahan.

Kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan dengan sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian adalah *Common Goal* 5 yaitu Ekonomi nonpertanian.



B. Strategi

1. Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional, maka strategi umum bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kemnakertrans RI yang dilaksanakan adalah:

- a. Fokus prioritas peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi tenaga kerja;
- b. Fokus prioritas perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial;
- c. Fokus prioritas peningkatan fasilitasi dan perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja;
- d. Pembangunan Perdesaan, arah kebijakan pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi adalah memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi, serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan;
- e. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah, Arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada tahun 2010-2014 adalah meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi (hulu-hilir).



2. Strategi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Jawa Barat

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi terkait dengan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2013 – 2018) adalah sebagai berikut :

- a. Strategi pertama, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja.
- b. Strategi kedua, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dengan arah kebijakan perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat.
- c. Strategi ketiga, perluasan lapangan kerja dengan arah kebijakan
 - a) Peningkatan penempatan tenaga kerja;
 - b) Penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat disabilitas.
- d. Strategi keempat, menata persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah provinsi, dengan arah kebijakan terwujudnya kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi.
- e. Strategi kelima, peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi dengan arah kebijakan meningkatkan kemandirian masyarakat transmigrasi.



- f. Strategi keenam, mendorong berkembangnya wirausaha muda dengan arah kebijakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang lebih kita kenal dengan istilah RTRW adalah sebuah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029 telah mempengaruhi perkembangan paradigma dalam penataan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Di sisi lain adanya dinamika perubahan baik internal maupun eksternal telah mendorong untuk segera menyesuaikan rencana tata ruang wilayah dalam rangka mengantisipasi perkembangan kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dinamika perkembangan tersebut di antaranya rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan rencana pembangunan aerocity di Kecamatan Kertajati, Kawasan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), rencana pembangunan tol Cisumdawu, rencana pembangunan jalur KA Rancaekek –



Tanjungsari – Cirebon, pengembangan lokasi agribisnis, pengembangan pariwisata, dan lain-lain.

Melihat dinamika perkembangan yang tersebut di atas, pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian menitikberatkan pada :

- a. Peningkatan daya saing tenaga kerja;
- b. Pendukung penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat disabilitas;
- c. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa melalui penciptaan 2 juta serapan tenaga kerja baru dan mendukung penciptaan 100.000 wirausaha baru di Jawa Barat,
- d. Perluasan kesempatan kerja, peningkatan pelayanan kesempatan kerja dan pelayanan informasi bursa kerja;
- e. Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat;
- f. Peningkatan dan pengembangan kemampuan serta keterampilan wirausaha muda,
- g. Pendukung terhadap terwujudnya kerjasama antar-daerah bidang ketrasmigrasian melalui Forum KIE Transmigrasi; dan
- h. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Jawa Barat kurun waktu 2013-2018 dirumuskan ke dalam 12 (dua belas) strategi yaitu :

1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
2. Mendukung penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas);
3. Menciptakan 2 juta serapan tenaga kerja melalui sektor primer, sekunder dan tersier dan mendukung penciptaan 100.000 wirausaha baru di Jawa Barat;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan wirausaha muda,
5. Memperluas kesempatan kerja;
6. Membina sarana hubungan industrial;
7. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh;
8. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan;
9. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi purna tenaga kerja;
10. Mendukung terhadap terwujudnya kerjasama antar-daerah bidang ketransmigrasian melalui Forum KIE Transmigrasi;
11. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi.
12. Memfasilitasi pengembangan manajemen dan sumber daya aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.



Sasaran pokok Agenda Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018, antara lain adalah difokuskan untuk peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, infrastruktur wilayah, energi dan air baku meningkatkan ekonomi pertanian, meningkatkan ekonomi non-pertanian, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, meningkatkan pengelolaan seni, budaya, wisata serta kepemudaan, meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan, menanggulangi kemiskinan, PMKS dan keamanan, serta meningkatkan kinerja aparatur serta birokrasi dengan penerapan IPTEK.

Selanjutnya pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada : a) Meningkatnya daya saing tenaga kerja, b) Mendukung penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas), c) Menciptakan 2 juta serapan tenaga kerja baru terutama dari sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa serta mendukung penciptaan 100.000 wirausaha baru di Jawa Barat, d) Meningkatnya dan berkembangnya kemampuan serta keterampilan wirausaha muda, e) Memperluas kesempatan kerja, peningkatan pelayanan kesempatan kerja serta pelayanan informasi bursa kerja, f) Meningkatnya pembinaan sarana hubungan industrial, g) Meningkatnya kesejahteraan pekerja/buruh, h) Meningkatnya perlindungan, pengawasan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat, i) Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi bagi purna tenaga kerja yang masih produktif, j) Mendukung terwujudnya kerjasama antar-daerah bidang ketrasmigrasian melalui Forum KIE



Transmigrasi, j) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi, l) meningkatnya kinerja aparatur Disnakertrans Provinsi Jawa Barat melalui pengembangan manajemen sumber daya aparatur.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Dalam menentukan langkah arah kebijakan, suatu organisasi perlu memiliki visi yang akan dicapai. Visi merupakan puncak sasaran yang ideal yang harus dicapai oleh organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat merumuskan Visi Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

“ Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigran yang Maju dan Sejahtera ”

Penjabaran makna dari Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Maju : adalah sikap dan kondisi tenaga kerja dan transmigran Jawa Barat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal.



Sejahtera : adalah sikap dan kondisi tenaga kerja dan transmigran Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur beserta keluarganya.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah merumuskan 4 (empat) Misi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.** Hal ini untuk menciptakan tenaga kerja Jawa Barat sebagai motor penggerak perekonomian serta mampu mampu bersaing secara nasional maupun regional.
2. **Meningkatkan Fasilitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.** Hal ini untuk menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas, baik dari segi jabatan, distribusi, maupun aksesibilitas.
3. **Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.** Hal ini untuk mendukung pertumbuhan investasi, keamanan dan kenyamanan bekerja serta kesejahteraan pekerja.
4. **Meningkatkan Fasilitas Ketransmigrasian dan Kemandirian Transmigran.** Hal ini untuk mendorong pengiriman transmigran berkualitas, yang ditandai dengan transmigran telah siap berkarya secara mental, *skill* dan mendorong peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat translok (*resettlement*) dan masyarakat sekitar



untuk dapat berwirausaha secara mandiri maupun berkelompok.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Tujuan strategis merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan

1. Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kerja Jawa Barat;
2. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan;
4. Peningkatan kualitas calon transmigran asal Jawa Barat.

Dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat tahun 2013-2018 *sebelumnya*, tujuan strategis tersebut telah ditetapkan indikator-indikator capaiannya menjadi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** seperti yang diuraikan pada bagan berikut ini :



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi tahun 2018 sebesar 0,56%,
		2. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan tahun 2018 sebesar 3,48%,
		3. Jumlah LPK yang terakreditasi tahun 2018 sebanyak 161 LPK.
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1. Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier tahun 2018 sebesar 88,97%,
		2. Jumlah wirausaha baru sebanyak tahun 2018 sebanyak 6.000 orang
3.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial pada tahun 2018 sebesar 75 %,
4.	Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	1. Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja tahun 2018 sebesar 31,45%,



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
		2. Jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur tahun 2018 sebanyak 675 lembaga,
		3. Persentase penyelesaian kasus TKI-B pada tahun 2018 sebesar 35%.
5.	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kenaikan UMK tahun 2018 sebesar 5%
6.	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigran	Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan tahun 2018 sebanyak 1.280 KK

Sejalan dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya maka indikator-indikator capaian yang menjadi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dalam *Review Renstra* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat turut mengalami penyelarasan. Dan hasil IKU yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut :



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing	1. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan tahun 2018 sebesar 3,48%,
		2. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensitahun 2018 sebesar 0,56%,
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan wirausaha baru	1. Persentase Serapan Tenaga Kerja tahun 2018 sebesar 88,97%,
		2. Jumlah wirausaha baru sebanyak tahun 2018 sebanyak 6.000 orang
3.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial pada tahun 2018 sebesar 75 %,
4.	Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	1. Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja tahun 2018 sebesar 31,45%
		2. Persentase fasilitasi penyelesaian kasus CTKI dan TKI pada tahun 2018 sebesar 35%.



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
5.	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 16,03 %
6.	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigran	Jumlah keluarga calon transmigran yang telah dilatih tahun 2018 sebanyak 1.280 jiwa

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta indikator kinerja *sebelum penyelarasan* disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RENSTRA SEBELUMNYA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Sampai Tahun 2018	Ket.
				2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kekerja	1. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	0,47 %	0,21	0,53	0,53	0,57	0,56	0,56%	Target Tahunan	
			2. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	3,94%	1,69	3,77	3,93	3,63	3,48	3,48%	Target Tahunan	
			3. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	33 LPK	13	25	30	30	161 LPK	Target Akumulasi		
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1. Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	85,17%	85,93	86,69	87,45	88,21	88,97	88,97%	Target Tahunan	
			2. Jumlah wirausaha baru	570 orang	1.180	1.850	1.000	1.000	400	6.000 orang	Target Akumulasi	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Sampai Tahun 2018	Ket.
				2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	1 Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	1. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	50%	55	60	65	70	75	75%	Target Tahunan
		2 Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	1. Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja	9,07%	9,97	9,97	19,14	23,68	31,45	31,45%	Target Tahunan
			2. Jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	50 lembaga	75	100	125	150	175	675 lembaga	Target Akumulasi
			3. Persentase penyelesaian kasus TKI-B	10%	15	20	25	30	35	35%	Target Tahunan
		3 Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	1 Persentase kenaikan UMK	5%	5	5	5	5	5	5%	Target Tahunan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Sampai Tahun 2018	Ket.
				2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi	1 Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	423 KK	87	150	180	210	230	1.280 KK	Target Akumulasi



Sementara untuk Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat beserta indikator kinerja *hasil Review Renstra* disajikan dalam Tabel 4.2 berikut ini.

TABEL 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REVIEW RENSTRA

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Sampai Tahun 2018	Ket.
					2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kerja Jawa Barat	1. Jumlah pencari kerja terdaftar yang mengikuti pelatihan kerja pada Tahun 2018 sebanyak 25.550 orang 2. Jumlah pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi pada Tahun 2018 sebanyak 3.500 orang	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing	1. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	3,94%	1,69	3,77	3,93	3,63	3,48	3,48%	Target Tahunan
				2. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	0,47 %	0,21	0,53	0,53	0,50	0,56	0,56%	Target Tahunan
2	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Persentase angka penganggur pada Tahun 2018 sebesar 7,19%	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan wirausaha baru	1. Persentase Serapan Tenaga Kerja	85,17%	85,93	86,69	87,45	88,21	88,97	88,97%	Target Tahunan
				2. Jumlah wirausaha baru	570 orang	1.180	1.850	1.000	1.000	400	6.000	Target Akumulasi



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Sampai Tahun 2018	Ket.
					2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan pada Tahun 2018 sebanyak 12.000 perusahaan	1 Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	1. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	50%	55	60	65	70	75	75%	Target Tahunan
			2 Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	1. Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja	9,07%	9,97	9,97	19,14	23,68	31,45	31,45%	Target Tahunan
				2. Persentase fasilitasi penyelesaian kasus CTKI dan TKI	10%	15	20	25	30	35	35%	Target Tahunan
			3 Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	1. Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan	5%	5	5	5	14,03	16,03	16,03%	Target Tahunan
4	Peningkatan kualitas calon transmigran asal Jawa Barat	Jumlah calon transmigran berkualitas asal Jawa Barat yang ditempatkan pada Tahun 2018 sebanyak 1.280 jiwa	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi	1. Jumlah keluarga calon transmigran yang telah dilatih	423 KK	87	150	180	210	230	1.280 jiwa	Target Akumulasi



4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Strategi Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian provinsi Jawa Barat kurun waktu 2013-2018 dirumuskan ke dalam 12 (dua belas) strategi yaitu :

1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
2. Mendukung penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas);
3. Menciptakan 2 juta serapan tenaga kerja melalui sektor primer, sekunder dan tersier dan mendukung penciptaan 100.000 wirausaha baru di Jawa Barat;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan wirausaha muda,
5. Memperluas kesempatan kerja;
6. Membina sarana hubungan industrial;
7. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh;
8. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan;
9. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi purna tenaga kerja;
10. Mendukung terhadap terwujudnya kerjasama antar-daerah bidang ketransmigrasian melalui Forum KIE Transmigrasi;
11. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi;
12. Memfasilitasi pengembangan manajemen dan sumber daya aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.



Sedangkan **kebijakan** yang dirancang untuk mendukung strategi tersebut antara lain:

1. Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing,
2. Memberikan fasilitasi perluasan kesempatan kerja, penempatan kerja (baik di dalam maupun di luar negeri), penciptaan wirausaha baru dan pembinaan purna-kerja,
3. Menyelesaikan kasus hubungan industrial secara cepat, tepat dan berkeadilan,
4. Memberikan fasilitasi kepada pekerja/buruh dalam rangka mencapai kesejahteraan,
5. Memberikan fasilitasi bagi pengawasan yang lebih intensif terhadap tenaga kerja,
6. Meningkatkan peran pekerja dan pengusaha dalam mewujudkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja,
7. Mendorong penyelenggaraan kerjasama antara daerah pengirim dengan daerah penempatan,
8. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi melalui pelatihan yang efektif.



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berikut ini penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Tabel 5.1 dibawah ini.



TABEL 5.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT
RENSTRA SEBELUMNYA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Peninggungan wab	Lokasi
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2018)			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kerja Jawa Barat	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdayasaing	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 0,56%	0,47 %	0,21	1.800	0,53	4.128	0,53	5735	0,57	5.875	0,56	6.250	0,56	23.788	Disnakertrans	Jawa Barat
		Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan		Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan sebesar 3,48% orang	3,94%	1,69	11.595	3,77	9.660	3,93	10.777	3,63	12.060	3,48%	10.241	3,48%	54.333	Disnakertrans	Jawa Barat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Peninggalan wab	Lokasi
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2018)			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah LPK yang terakreditasi		Jumlah BLK yang terakreditasi sebanyak 161 LPK	33 LPK	13	130	25	143	30	160	30	173	30	190	161	796	Disnakertrans	
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan wirausaha baru	Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier sebesar 88,97%	85,17%	85,93	13.412	86,69	15.605	87,45	18.100	88,21	20.343	88,97	22.641	88,97%	90.101	Disnakertrans	Jawa Barat
		Jumlah wirausaha baru	Program Peningkatan Kesempatan Kerja & Program Pengembangan Transmigrasi	Jumlah wirausaha baru sebanyak 6.000 orang	570 orang	1.180	1.409	1.850	2.981	1.000	4.694	1.000	5.866	400	2.979	6.000	17.929	Disnakertrans	Jawa Barat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Peninggungan wab	Lokasi
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2018)			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial sebesar 75%	50%	55	5.936	60	7.415	65	9.434	70	9.984	75	10.526	75	43.295	Disnakertrans	Jawa Barat
	Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja		Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja sebanyak 1.045 kali	9,07%	9,97	523	9,97	858	19,14	943	23,68	1.037	31,45	1.140	31,45	4.501	Disnakertrans	Jawa Barat
		Jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur sebanyak 675 lembaga	50 lembaga	75	97	100	107	125	118	150	130	175	143	675	595	Disnakertrans	Jawa Barat
		Persentase penyelesaian kasus TKI-B		Persentase penyelesaian kasus TKI-B sebesar 35%	10%	15	100	20	150	25	200	30	250	35	300	35	1.000	Disnakertrans	Jawa Barat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Peninggungan wab	Lokasi
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2018)			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kenaikan UMK	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kenaikan UMK sebesar 5%	5%	5	850	5	850	5	1.700	5	1.700	5	1.700	5	6.800	Disnakertrans	Jawa Barat
Peningkatan kualitas calon transmigran asal Jawa Barat	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	Program Pengembangan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan sebanyak 1.280 KK	423 KK	87	428	150	987	180	1.485	210	1.816	230	2.140	1.280	11.712	Disnakertrans	Jawa Barat



Sementara penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif HASIL *Review Renstra* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel 5.2 dibawah ini.

TABEL 5.2

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT
REVIEW RENSTRA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penerimaan Anggaran	Lokasi
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2018)			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kerja Jawa Barat	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdayasaing	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan sebesar 3,48% orang	3,94%	1,69	11.595	3,77	9.660	3,93	10.777	3,63	12.060	3,48%	10.241	3,48%	54.333	Disnakertrans	Jawa Barat
		Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi		Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 0,56%	0,47 %	0,21	1.800	0,53	4.128	0,53	5735	0,57	5.875	0,56	6.250	0,56	23.788	Disnakertrans	Jawa Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Peninggub	Lokasi
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2018)			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan wirausaha baru	Persentase Serapan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja sebesar 88,97%	85,17%	85,93	13.412	86,69	15.605	87,45	18.100	88,21	20.343	88,97	22.641	88,97%	90.101	Disnakertrans	Jawa Barat
		Jumlah wirausaha baru	Program Peningkatan Kesempatan Kerja & Program Pengembangan Transmigrasi	Jumlah wirausaha baru sebanyak 6.000 orang	570 orang	1.180	1.409	1.850	2.981	1.000	4.694	1.000	5.866	400	2.979	6.000	17.929	Disnakertrans	Jawa Barat
Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial sebesar 75%	50%	55	5.936	60	7.415	65	9.434	70	9.984	75	10.526	75	43.295	Disnakertrans	Jawa Barat
	Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat	Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja		Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja sebanyak 1.045 kali	9,07%	9,97	523	9,97	858	19,14	943	23,68	1.037	31,45	1.140	31,45	4.501	Disnakertrans	Jawa Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pengguna wab	Lokasi
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2018)			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	kerja	Persentase fasilitasi penyelesaian kasus CTKI dan TKI	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase fasilitasi penyelesaian kasus CTKI dan TKI sebesar 35%	10%	15	100	20	150	25	200	30	250	35	300	35	1.000	Disnakertrans	Jawa Barat
	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 5%	5%	5	850	5	850	5	1.700	14,03	1.700	16,03	1.700	16,03	6.800	Disnakertrans	Jawa Barat
Peningkatan kualitas calon transmigran asal Jawa Barat	Jumlah calon transmigran berkualitas asal Jawa Barat yang ditempatkan pada Tahun 2018 sebanyak 1.280 jiwa	Jumlah keluarga calon transmigran yang telah dilatih	Program Pengembangan Transmigrasi	Jumlah keluarga calon transmigran yang telah dilatih sebanyak 1.280 jiwa	423 KK	87	428	150	987	180	1.485	210	1.816	230	2.140	1.280	11.712	Disnakertrans	Jawa Barat



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berikut adalah rumusan penjabaran indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini ditampilkan dalam Tabel 6.1.

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2013	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018
1.	Persentase tenaga kerja yang siap bekerja dan tersertifikasi	350 orang	0,56 %
2.	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	50%	75%
3.	Jumlah Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	-	12.000 perusahaan
4.	Presentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan	-	60%



No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2013	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018
5.	Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja	200.000 orang	80.280 orang
6.	Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	-	230 orang



BAB VII PENUTUP

Review Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan di dalam kebijakan dan program) dalam mengemban tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Review Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, harus dapat dijadikan acuan bagi seluruh jajaran Satuan Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan harapan seluruh anggota Satuan Kerja memiliki kesamaan pandang dalam mencapai tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ke depan. Dengan komitmen yang telah ditetapkan bersama, *Review* Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini selanjutnya harus dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun Program Kerja yang lebih rinci dan operasional serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan *Review* Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan seluruh stakeholders bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2013-2018.



Disadari bahwa penyusunan *Review* Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini memerlukan masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bandung, 30 Desember 2016

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,**



Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19621121 198909 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **Nama Unit Organisasi** : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
2. **Tugas** : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meliputi sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sub urusan penempatan tenaga kerja, sub urusan hubungan industrial, sub urusan pengawasan ketenagakerjaan, sub urusan perencanaan penyiapan pemindahan transmigran yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
3. **Fungsi** :
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. Menyenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing	Persentasi pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Formulasi Perhitungan: (Rekapitulasi jumlah peserta yang lulus pelatihan / Jumlah penganggur yang terdaftar di Informasi Pasar Kerja) X 100% Tipe Perhitungan: Non-kumulatif	Bidang Lattas, BPPTKLN, BPKM, BPK Jabar dan Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
		Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Formulasi Perhitungan: (Rekapitulasi jumlah peserta yang lulus uji kompetensi di Disnakertrans Provinsi Jabar / Jumlah penganggur yang terdaftar di Informasi Pasar Kerja) X 100% Tipe Perhitungan: Non-kumulatif	Bidang Lattas
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan wirausaha baru	Persentase serapan tenaga kerja	Formulasi Perhitungan: (Rekapitulasi jumlah serapan tenaga kerja pada sektor usaha primer, sekunder dan tersier yang terdaftar di Informasi Pasar Kerja / Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Informasi Pasar Kerja) X 100% Tipe Perhitungan: Non-kumulatif	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPPTKLN, BPKM
		Jumlah wirausaha baru	Formulasi Perhitungan: Jumlah wirausaha baru yang dibina oleh Disnakertrans Provinsi Jabar Tipe Perhitungan: Non-kumulatif	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, & BPKM
3.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Formulasi Perhitungan: Perbandingan antara kasus yang diselesaikan dengan kasus yang tercatat X 100% Tipe Perhitungan: Non-kumulatif	Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
4.	Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	<p>a. Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja</p> <p>b. Persentase fasilitasi penyelesaian kasus CTKI dan TKI</p>	<p>Formulasi Perhitungan: $\{(Jumlah\ kejadian\ kecelakaan\ kerja\ pada\ tahun\ ke-n - Jumlah\ kejadian\ kecelakaan\ kerja\ pada\ tahun\ ke-n-1) / Jumlah\ kejadian\ kecelakaan\ kerja\ pada\ tahun\ ke-n-1\} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non-kumulatif</p> <p>Formulasi Perhitungan: $(Jumlah\ kasus\ CTKI\ \&\ TKI\ yang\ telah\ selesai / Jumlah\ kasus\ CTKI\ \&\ TKI\ yang\ tercatat) \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non-kumulatif</p>	<p>Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <p>BPTKLN</p>
5.	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	<p>Formulasi Perhitungan: Perbandingan antara Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar tahun ini dengan Jumlah Orang Bekerja BPS tahun ini $\times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non-kumulatif</p>	Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
6.	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi	Jumlah keluarga calon transmigran yang telah dilatih	Formulasi Perhitungan: Rekapitulasi jumlah keluarga calon transmigran yang telah dilatih sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi Tipe Perhitungan: Akumulasi	BPKM & Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19621121 198909 1 001